

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu lingkup dari keuangan negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), disamping barang-barang inventaris kekayaan negara dan badan usaha milik negara (BUMN). Baik APBN maupun barang-barang inventaris kekayaan negara dikelola secara langsung oleh negara. Dipihak lain, pada tingkat pemda terdapat pula ruang lingkup yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), barang-barang inventaris kekayaan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). APBD maupun barang-barang inventaris kekayaan daerah juga dikelola secara langsung oleh daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 31 tahun 2016, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Salah satu unsur kegiatan yang terdapat di dalam APBD adalah belanja. Belanja digunakan dalam melaksanakan aktivitas, baik oleh individu maupun organisasi sehingga belanja sering diartikan sebagai bentuk pengeluaran kas untuk dapat memenuhi kebutuhan dari pelaksanaan aktivitas.

Belanja merupakan kata yang sering kita dengar sehari-hari, pada umumnya belanja di artikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan individu maupun organisasi. Begitu pula pada instansi pemerintahan, pada instansi pemerintah belanja adalah pengeluaran perusahaan atau organisasi swasta. Belanja pada instansi pemerintahan sangat penting guna menjalankan program maupun kegiatan instansi tersebut untuk kepentingan negara/daerah. Pemerintah pusat dan daerah menyediakan anggaran untuk setiap instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang, belanja didefinisikan sebagai

semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja merupakan aspek penting dalam perekonomian negara dan daerah. Sehingga dapat terlihat bahwa perlu diketahui bagaimana sistem dan manajemen akuntansi dalam mengelola dan mengendalikan anggaran dan realisasi dalam belanja.

Dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Semarang, terdapat pengelompokan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam hal ini belanja modal termasuk salah satu belanja yang tergolong ke dalam jenis belanja langsung di mana penganggarannya terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah. Karena belanja modal terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah dan mengurangi kas daerah tetapi juga sekaligus menambah aset daerah, maka sangat perlu untuk memperhatikan sistem akuntansi belanja modal pada pemerintah daerah tersebut.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang menerapkan Sistem Akuntansi berbasis Kas menuju Akrua (*cash toward accrual*) untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Atas dasar pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Sistem Akuntansi Belanja Modal pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang”

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan pemaparan materi yang tidak sesuai dengan judul yang telah ditentukan, serta bertujuan agar setiap bahasan dengan mudah dapat dipahami, maka materi yang dibahas dibatasi pada:

- 1) Pengertian Belanja Modal
- 2) Karakteristik Belanja Modal
- 3) Pengertian Sistem Akuntansi
- 4) Kerangka Umum Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- 5) Sistem Akuntansi Belanja

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah:

- 1) Mengetahui apakah Sistem Akuntansi Belanja Modal pada Badan Pendapatan Daerah di Kota Semarang sudah memenuhi syarat sistem akuntansi yang baik.
- 2) Mengetahui apa saja yang terkait dengan pelaksanaan sistem akuntansi belanja modal.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan dalam Penulisan Tugas Akhir ini dapat dibedakan berdasarkan pihak-pihak yang berkepentingan, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Bagi Penulis menambah pengetahuan, dan wawasan penulis, serta menjadi bahan masukan jika di kemudian hari penulis diminta pendapat yang berkaitan tentang sistem akuntansi belanja modal. Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
- 2) Bagi Universitas Diponegoro sebagai sumber informasi dan sumber referensi yang diperlukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi mahasiswa dan pembaca khususnya dalam penyusunan Tugas Akhir.

- 3) Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dapat dijadikan sebagai masukan dalam usaha pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Jenis Data

Di dalam melaksanakan studi, penulis membutuhkan banyak data yang berhubungan dengan prosedur. Menurut cara memperolehnya jenis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir, adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi langsung dari objeknya. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan mewawancarai langsung dengan pihak yang berkaitan, berupa data yang diperoleh di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat tidak secara langsung dari objek peneliti. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain, seperti menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan referensi yang terkait dengan penulisan laporan tugas akhir.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka untuk tujuan penelitian. Salah satu faktor pendukung keberhasilan penelitian ilmiah ialah kecermatan dalam penggunaan metode penelitian. Dikatakan demikian karena metode penelitian merupakan jalan atau cara sistematis yang ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut Hamid Darmadi (2010: 42) berpendapat bahwa “Metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan”.

Berikut ini beberapa metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun Tugas Akhir, yaitu:

1) Metode Observasi

Sutrisno Hadi (1968) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Maka dalam observasi ini penulis terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari instansi atau situasi yang diamati sebagai sumber data.

2) Metode Wawancara

Selain dari pengumpulan data dengan cara observasi, data dapat juga diperoleh dengan mengadakan wawancara. Menurut Lexy J Moleong (1991:135) menjelaskan bahwa wawancara dengan tujuan percakapan tertentu, dalam metode ini peneliti dan koresponden berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya langsung antara peneliti terhadap narasumber atau sumber data.

3) Studi Pustaka

Menurut Pohan dalam Prastowo (2012:18) kegiatan ini (penyusunan kajian pustaka) bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Studi pustaka merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab, di mana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab sesuai kebutuhannya agar diperoleh pemahaman

yang lebih mendalam. Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, jenis dan metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini menjelaskan secara lengkap sejarah berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, kebijakan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, ruang lingkup kegiatan kantor, lokasi instansi serta deskripsi tugas dari masing-masing bagian sesuai dengan jabatannya.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini diuraikan mengenai Pengertian Belanja Modal, Karakteristik Belanja Modal, Pengertian Sistem Akuntansi, Kerangka Umum Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, serta Sistem Akuntansi Belanja.

BAB IV Penutup

Sebagai penutup, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan atas bab-bab yang sudah dibahas sebelumnya serta memberikan saran sesuai topik yang dibahas.